



**PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PRODUK
DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP KEMISKINAN DI
INDONESIA.**

PERIODE 2010 - 2018

PROPOSAL SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh :

Anugerah Mardiansyah

NIM 130810101233

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2020

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu proses multidimensi yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur social, sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penangana ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro dan Smith, 2006: 22). Pandangan ekonomi baru menganggap pertumbuhan ekonomi semata tidak dapat dijadikan sebagai tujuan utama pembangunan, melainkan perlu diperhatikan mengenai pengentasan kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang (Todaro, 2000). Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi. Menurut M. Nasir dalam Ernawati (2012) permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensi. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu.

Pembangunan ekonomi daerah juga merupakan tujuan utama dalam meningkatkan masyarakat daerah untuk mempunyai hidup yang lebih layak seperti masyarakat lainnya dan kemiskinan merupakan masalah yang kompleks yang sering dihadapi oleh Negara sedang berkembang seperti Indonesia. Dalam upaya meningkatkan tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus bersama berinisiatif untuk melakukan pembangunan daerahnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya harus lebih memanfaatkan sumber daya yang telah ada. Untuk menaksir sumber daya yang diperlukan mampu menaksir potensi yang ada untuk merancang dan membantu membangun

perekonomian daerah (Arsyad, 2004). Menurut Todaro (2006), proses pembangunan paling tidak memiliki tiga tujuan inti yaitu 1) peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup yang pokok; 2) peningkatan standar hidup; 3) perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial.

Indonesia adalah Negara yang besar dalam banyak hal seperti luas wilayah, jumlah penduduk, sumber daya alam, dan Indonesia juga memiliki penduduk miskin yang besar pula. Kemiskinan merupakan masalah yang fenomenal sepanjang sejarah Negara Indonesia sebagai Negara kesatuan yang telah merdeka sejak tahun 1945. Dengan persoalan kemiskinan ini yang menyebabkan jutaan anak-anak yang tidak dapat mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan dalam membiayai kesehatan, kurangnya pemerintah memberikan perhatian yang khusus masyarakat miskin, semakin meningkatnya jumlah pengangguran yang disebabkan karna lapangan pekerjaan yang minim dan jumlah pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, serta kurangnya jaminan sosial oleh pemerintah dalam memenuhi perlindungan terhadap masyarakat miskin yang menyebabkan rakyat yang kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan mereka secara keterbatasan.

Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Ada beberapa faktor yang saling berkaitan antara lain tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan lokasi lingkungan. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. Banyak dampak negatif yang disebabkan oleh kemiskinan, selain timbulnya banyak masalah-masalah sosial, kemiskinan juga dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara. Kemiskinan yang tinggi akan menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan untuk

melakukan pembangunan ekonomi menjadi lebih besar, sehingga secara tidak langsung akan menghambat pembangunan ekonomi.

Penyebab kemiskinan bermula pada teori lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*) dari Nurkse 1953. Yang dimaksud lingkaran kemiskinan adalah suatu rangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi suatu keadaan dimana suatu negara akan tetap miskin dan akan banyak mengalami kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih baik. Adanya keterbelakangan, dan ketertinggalan SDM (yang tercermin oleh rendahnya IPM), ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima (yang tercermin oleh rendahnya PDRB per kapita). Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada rendahnya akumulasi modal sehingga proses penciptaan lapangan kerja rendah (tercermin oleh tingginya jumlah pengangguran). Rendahnya akumulasi modal disebabkan oleh keterbelakangan dan seterusnya (Mudrajad Kuncoro, 1997).

Di Indonesia pada tahun 2007, penduduk miskin tercatat sebanyak 37,17 juta orang (16,58 persen). Beberapa program pemerintah yang ditujukan bagi penduduk miskin dijalankan pemerintah sejak 2005 memiliki dampak positif bagi penurunan angka kemiskinan. Hal ini dapat dilihat pada terus menurunnya angka kemiskinan, baik dalam jumlah maupun persentase penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2012 mencapai 29,13 juta orang, turun 0,89 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2011 yang sebesar 30,02 juta orang.

Pengklasifikasian antara negara maju, berkembang, atau negara terbelakang salah satunya adalah dengan menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, Pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh *United Nations*

Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. Badan Pusat Statistik mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan *backcasting* sejak tahun 2010.

Indeks Pembangunan Manusia dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur Panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standart of living). Umur Panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH), yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk bertahan hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama Sekolah. RLS adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah atau sedang menjalani Pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun) di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

Menurut Lanjouw, dkk. (2001) dalam Ginting, et al (2008) dan Mirza (2012) menyatakan bahwa pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena aset utama penduduk miskin adalah tenagakasar mereka. Tersedianya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akansangat membantu untuk meningkatkan produktifitas, dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembangunan manusia belum secara optimal dilakukan karena hanya terfokus pada pengurangan kemiskinan.

Salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah adalah angka PDRB per kapita. PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode (Hadi Sasana, 2001). Sedangkan yang dimaksud dengan PDRB per kapita adalah

PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita sering digunakan sebagai indikator pembangunan. Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut dikarenakan semakin besar pendapatan masyarakat daerah tersebut (Thamrin, 2001). Hal ini berarti juga semakin tinggi PDRB per kapita semakin sejahtera penduduk suatu wilayah. Dengan kata lain jumlah penduduk miskin akan berkurang.

Tidak hanya pengangguran dan IPM yang menjadi acuan atau latar belakang dalam penelitian ini, namun PDRB juga sangat penting dikarenakan PDRB merupakan ekspansi dari kapasitas untuk memproduksi barang dan jasa dari suatu perekonomian atau ekspansi dari kemungkinan memproduksi (*production possibilities*) suatu perekonomian. PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan pekonomian diseluruh daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu dan biasanya satu tahun. PDRB juga dapat digunakan untuk menilai pertumbuhan ekonomi daerah, dalam rangka peningkatan kesejahteraan penduduknya dalam hal ini adalah penurunan jumlah penduduk miskin di suatu wilayah. Maka dari itu, PDRB merupakan variabel yang sangat penting dalam penurunan jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahas mengenai jumlah penduduk miskin di Indonesia. Selain itu di dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana pengaruh variabel Indeks pembangunan manusia dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), terhadap kemiskinan di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan secara lebih informatif mengenai pengaruh IPM dan PDRB tersebut terhadap kemiskinan sehingga bisa dijadikan dasar bagi pemerintah dalam menentukan skala prioritas program peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus penurunan tingkat kemiskinan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan pada latar belakang mengenai kemiskinan yang terjadi di Indonesia beserta faktor yang dapat mempengaruhi yakni indeks pembangunan manusia yang terdiri dari beberapa indikator yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2010-2018?
2. Seberapa besar pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2010-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan sebelumnya bahwa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2010-2018.
2. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2010-2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan paparan yang dijelaskan dalam latar belakang sebelumnya, maka dari itu hasil penelitian diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil dari penelitian dapat digunakan sebagai referensi tambahan pada bidang karya ilmiah lainnya khususnya bagi mahasiswa jurusan ilmu ekonomi.
2. Penelitian ini merupakan bentuk pengaplikasian dan pengujian atas teori yang diperoleh sehingga diharapkan mampu memberikan manfaat dalam penambahan ilmu pengetahuan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Dapat digunakan untuk menambah informasi mengenai hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap kemiskinan di Indonesia.
2. Dapat digunakan sebagai bahan referensi tambahan bagi pihak yang memiliki kepentingan penelitian yang sama.
3. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pihak pembuat kebijakan untuk menetapkan kebijakan yang lebih baik untuk kinerja ekonomi kedepannya

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kemiskinan

Menurut Anne Booth (1996) berpendapat bahwa ada lima faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan. Kelima faktor tersebut adalah faktor ekonomi yang terdiri dari kurangnya modal dan rendahnya teknologi. Kedua, adalah faktor sosial budaya yang terdiri dari rendahnya keahlian dan pendidikan, terbatasnya lapangan pekerjaan dan adanya budaya miskin. Sementara faktor ketiga adalah geografi dan lingkungan yang terdiri dari keterisolasian wilayah, banyaknya penyakit dan kurang suburannya lahan. Lalu yang keempat, adalah personal dan fisik yang terdiri dari umur, jenis kelamin, dan tingkat kesehatan perorangan. Dan yang terakhir adalah keterbatasan mengakses beberapa hal seperti produk pasar, fasilitas publik dan fasilitas kredit.

2.1.1 Definisi dan Ukuran Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara sedang berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan adalah keterbatasan yang disandang seseorang, keluarga, komunitas atau bahkan negara yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan hukum dan keadilan serta hilangnya generasi dan suramnya masa depan bangsa dan negara. Pengertian itu merupakan pengertian secara luas, telah dikatakan kemiskinan terkait dengan ketidaknyamanan dalam hidup. Dalam segala bidang selalu menjadi kaum tersingkir karena tidak dapat menyamakan kondisi dengan kondisi masyarakat sekitarnya.

Kemiskinan *multi dimensional*, artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan, dan keterampilan serta aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan

dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu, dimensi-dimensi kemiskinan saling berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti kemajuan atau kemunduran pada salah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran aspek lainnya. Dan aspek lain dari kemiskinan ini adalah bahwa yang miskin itu manusianya baik secara individual maupun kolektif (Lincoln Arshad, 1999).

Menurut PBB definisi kemiskinan adalah bahwa kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya, seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standar hidup, kebebasan, harga diri dan rasa dihormati seperti orang lain.

Ukuran kemiskinan menurut Nurkse (dalam Lincoln Arshad, 1999), secara sederhana dan yang umum digunakan dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu:

1. Kemiskinan Absolut

Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup.

Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi juga iklim, tingkat kemajuan suatu negara, dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Walaupun demikian, untuk dapat hidup layak, seseorang membutuhkan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosialnya.

2. Kemiskinan Relatif

Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan

keadaan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah sehingga konsep kemiskinan ini bersifat dinamis atau akan selalu ada.

Oleh karena itu, kemiskinan dapat dari aspek ketimpangan sosial yang berarti semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan selalu miskin.

Kebutuhan dasar dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu kebutuhan dasar yang diperlukan sekali untuk mempertahankan hidupnya dan kebutuhan lain yang lebih tinggi. *United Nation Research Institute for Social Development (UNRISD)* menggolongkan kebutuhan dasar manusia atas tiga kelompok yaitu :

1. Kebutuhan fisik primer yang terdiri dari kebutuhan gizi, perumahan, dan kesehatan.
2. Kebutuhan kultural yang terdiri dari pendidikan, waktu luang (*leisure*), dan rekreasi serta ketenangan hidup.
3. Kelebihan pendapatan untuk mencapai kebutuhan lain yang lebih tinggi.

Kebutuhan dasar tidak hanya meliputi kebutuhan keluarga, tetapi juga meliputi kebutuhan fasilitas lingkungan kehidupan manusia, seperti yang dikemukakan oleh *Internasional Labor Organization (ILO, 1976)*.

Kebutuhan dasar meliputi 2 unsur, yaitu : pertama, kebutuhan yang meliputi tuntutan minimum tertentu dari suatu keluarga konsumsi pribadi seperti makanan yang cukup, tempat tinggal, pakaian, juga peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang dilaksanakan. Kedua, kebutuhan meliputi pelayanan sosial yang diberikan oleh dan untuk masyarakat seperti air minum yang bersih, pendidikan, dan kultural (Lincoln Arshad, 1999).

2.1.2 Indikator Kemiskinan

Persepsi mengenai kemiskinan telah berkembang sejak lama dan sangat bervariasi antara budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. Kriteria untuk membedakan penduduk miskin dengan yang tidak miskin mencerminkan prioritas nasional tertentu dan konsep normatif mengenai kesejahteraan. Namun pada umumnya saat negara-negara menjadi lebih kaya, persepsi mengenai tingkat

konsumsi minimum yang bisa diterima, yang merupakan garis batas kemiskinan akan berubah.

Garis kemiskinan adalah suatu ukuran yang menyatakan besarnya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan kebutuhan non makanan, atau standar yang menyatakan batas seseorang dikatakan miskin bila dipandang dari sudut konsumsi. Garis kemiskinan yang digunakan setiap negara berbeda-beda, sehingga tidak ada satu garis kemiskinan yang berlaku umum. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup.

Menurut Badan Pusat Statistik (2010), penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat yang berpenghasilan dibawah Rp 7.057 per orang per hari. Penetapan angka Rp 7.057 per orang per hari tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Sedang untuk pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

Sedangkan ukuran menurut *World Bank* menetapkan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan per kapita. Penduduk yang pendapatannya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan perkapita nasional. Dalam konteks tersebut, maka ukuran kemiskinan menurut *World Bank* adalah USD \$2 per orang per hari.

Ukuran kemiskinan dipertimbangkan berdasarkan pada norma pilihan dimana norma tersebut sangat penting terutama dalam hal pengukuran didasarkan konsumsi (*consumption based poverty line*).

Oleh sebab itu, menurut Kuncoro (1997) garis kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi terdiri dari dua elemen, yaitu:

1. Pengeluaran yang diperlukan untuk memberi standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya.
2. Jumlah kebutuhan yang sangat bervariasi yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan sehari-hari.

Garis kemiskinan dibedakan menurut tempat dan waktu, jadi setiap daerah baik di desa maupun di kota memiliki nilai yang berbeda-beda dan biasanya nilai ini bertambah pada norma tertentu, pilihan norma tersebut sangat penting terutama dalam hal pengukuran kemiskinan. Batas garis kemiskinan dibedakan antara desa dan kota. Perbedaan ini sangat signifikan antara di desa dan di kota, hal ini disebabkan pada perbedaan dan kompleksitas di desa dan di kota.

Menurut Badan Pusat Statistik (2010), penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat yang berpenghasilan dibawah Rp 7.057 per orang per hari. Penetapan angka Rp 7.057 per orang per hari tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Garis kemiskinan non makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan (luas lantai bangunan, penggunaan air bersih, dan fasilitas tempat pembuangan air besar); pendidikan (angka melek huruf, wajib belajar 9 tahun, dan angka putus sekolah); dan kesehatan (rendahnya konsumsi makanan bergizi, kurangnya sarana kesehatan serta keadaan sanitasi dan lingkungan yang tidak memadai).

Sedangkan ukuran menurut *World Bank* menetapkan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan per kapita. Penduduk yang pendapatan per kapitanya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan perkapita nasional, maka termasuk dalam kategori miskin. Dalam konteks tersebut, maka ukuran kemiskinan menurut *World Bank* adalah USD \$2 per orang per hari.

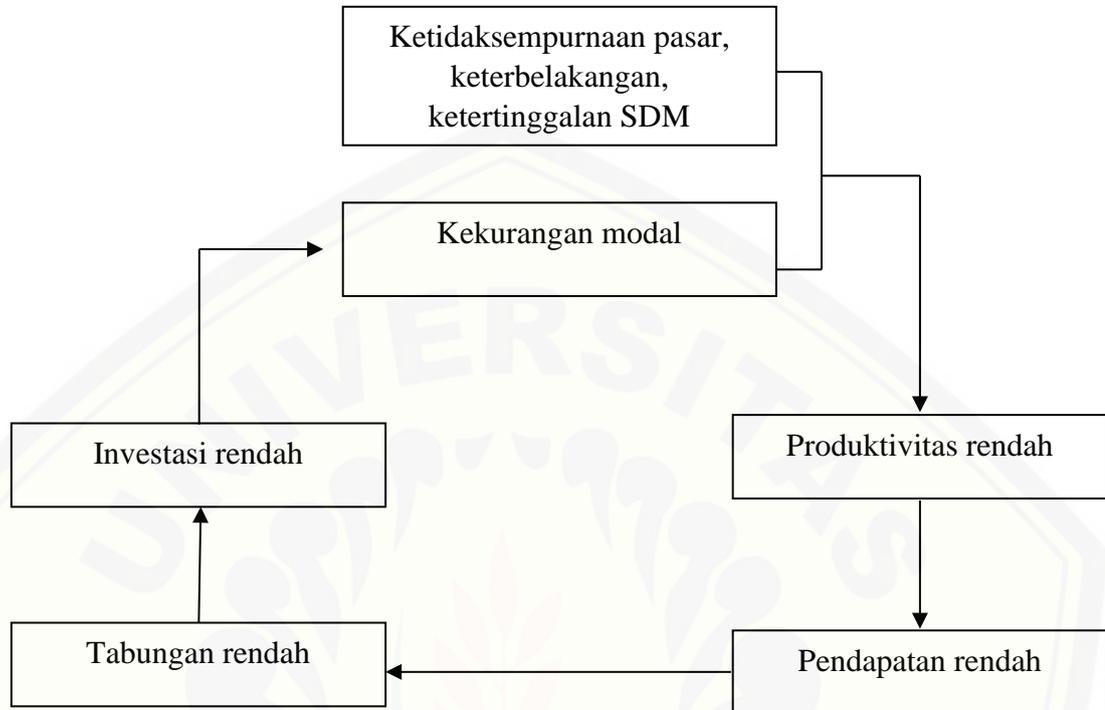
2.1.3 Penyebab Kemiskinan

Sharp (1996) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi:

1. Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena pendidikan yang rendah, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan.
3. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

2.1.4 Teori Lingkaran Kemiskinan

Ketiga penyebab kemiskinan di atas bermuara pada teori lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Yang dimaksud lingkaran kemiskinan adalah suatu lingkaran suatu rangkaian yang saling mempengaruhi satu sama lain secara sedemikian rupa, sehingga menimbulkan suatu keadaan dimana suatu negara akan tetap miskin dan akan banyak mengalami kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih baik. Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitas mengakibatkan rendahnya pendapatanyang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, baik investasi manusia maupun investasi kapital. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya. Logika berpikir ini dikemukakan oleh Ragnar Nurkse 1953, yang mengatakan “ *a poor country is a poor because it is poor*” (negara miskin itu miskin karena dia miskin).



Gambar 2.1.4 Lingkaran Kemiskinan Baldwin dan Meier

2.2 Indeks Pembangunan Manusia

Menurut United Nations Development Programme atau UNDP (2007), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (*"a process of enlarging peoples' choices"*), yang menekankan pada kebebasan untuk sehat (healthy), terdidik (educated), dan mendapatkan standar hidup yang lebih baik. Definisi cukup menyimpulkan bahwa aset berharga suatu negara adalah sumber daya manusia itu sendiri. IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari tiga indeks dasar yaitu indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks standar hidup layak. IPM merupakan suatu ukuran yang meliputi gabungan tiga dimensi tentang pembangunan manusia, yaitu 1) usia panjang yang diukur dari usia harapan hidup, 2) pengetahuan yang diukur dengan rata-rata tertimbang dari jumlah orang dewasa

yang dapat membaca dan rata-rata lama tahun sekolah, dan 3) penghasilan yang diukur dengan pendapatan per kapita yang telah disesuaikan menurut daya beli mata uang masing-masing negara (Kuncoro, 2006).

Berdasarkan konsep Pembangunan Manusia yang dikembangkan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0 – 100,0 dengan kategori sebagai berikut:

- a. Sangat Tinggi : IPM lebih dari 80,0
- b. Tinggi : IPM antara 66,0 – 79,9
- c. Menengah : IPM antara 50,0 – 65,9
- d. Rendah : IPM kurang dari 50,0

(Sumber: Orinbao, 2013)

Berdasarkan laporan UNDP (1995), dasar pemikiran konsep pembangunan manusia meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.
- b. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus berpusat pada penduduk secara komprehensif dan bukan hanya pada aspek ekonomi semata.
- c. /Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan atau kapasitas manusia, tetapi juga pada upaya-upaya memanfaatkan kemampuan/kapasitas manusia tersebut secara optimal.
- d. Pembangunan manusia didukung empat pilar pokok, yaitu: produktivitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan.
- e. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Menurut UNDP dalam Human Development Report (HDR) 1995 yang menekankan bahwa untuk memperluas pilihan-pilihan manusia, konsep pembangunan manusia harus dibangun dari empat dimensi yang tidak terpisahkan. Berdasarkan konsep di atas maka untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, ada empat unsur pokok yang perlu diperhatikan (UNDP 1995) yaitu:

a. Produktivitas (Productivity)

Masyarakat harus mampu untuk meningkatkan produktifitas mereka dan berpartisipasi penuh dalam proses mencari penghasilan dan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi merupakan bagian dari model pembangunan manusia.

b. Pemerataan (equity)

Masyarakat harus mempunyai akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapuskan sehingga masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan memperoleh manfaat dari peluang-peluang yang ada

c. Kestinambungan (Sustainability)

Akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan bahwa tidak hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Semua jenis pemodalan baik itu fisik, manusia, dan lingkungan hidup harus dilengkapi.

d. Pemberdayaan (Empowerment)

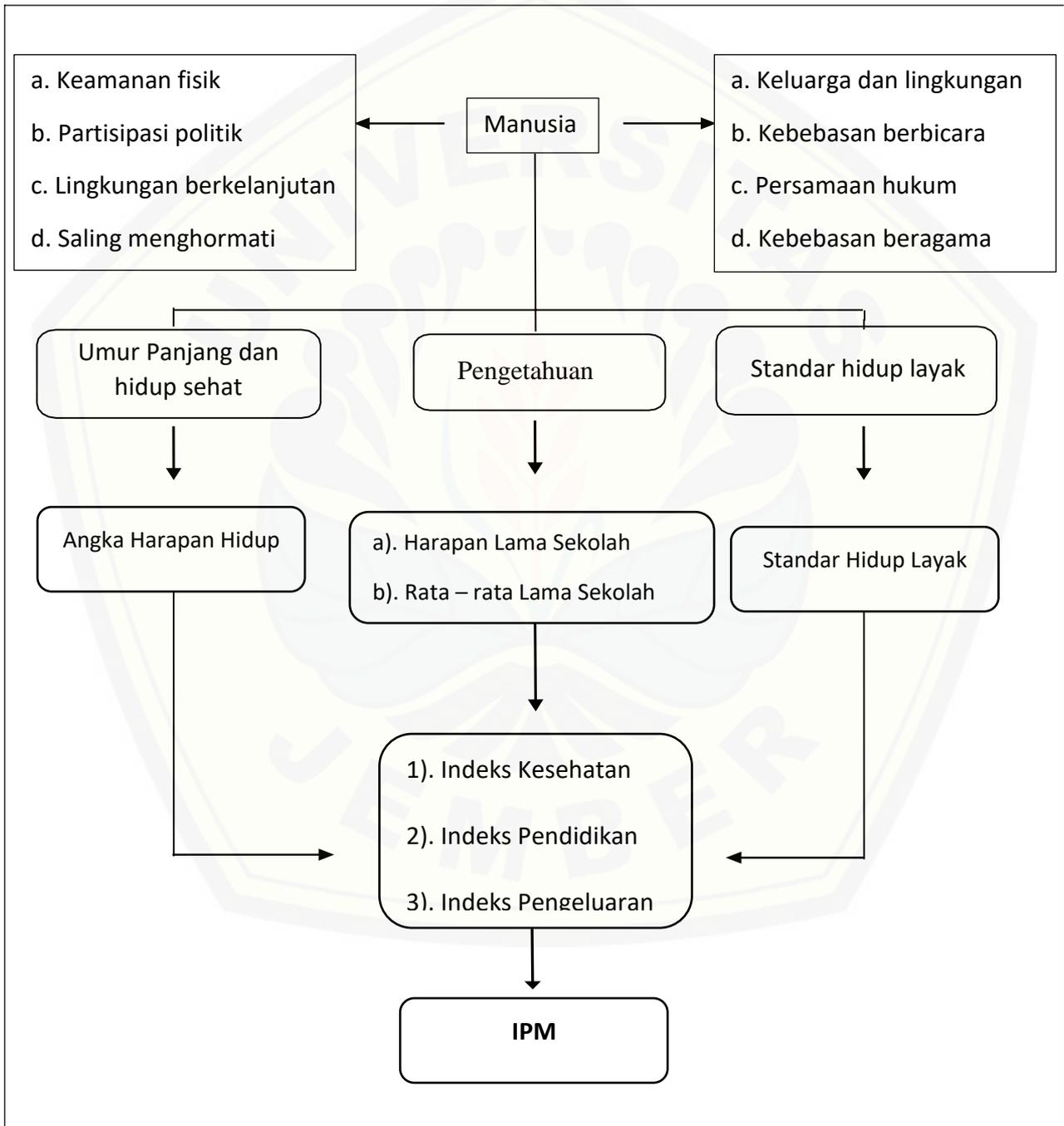
Pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat, dan bukan hanya untuk mereka. Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang memengaruhi kehidupan mereka.

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu:

- a. Dimensi umur panjang dan sehat.
- b. Dimensi pengetahuan.
- c. Dimensi kehidupan yang layak (BPS, 2012).

Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (*Purchasing Power Parity*). Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Todaro dan Smith (2011:57) mengatakan, “indikator yang paling luas digunakan untuk mengukur komparatif pembangunan sosio-ekonomi disajikan dalam laporan-laporan tahunan (*United Nations Development Program*) UNDP yang berjudul *Human Development Report* (Laporan Pembangunan Manusia).” Inti dari laporan yang dimulai sejak 1990 tersebut yaitu pembuatan dan penyempurnaan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index-HDI*),



Gambar 2.1 Indikator IPM

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015

Berdasarkan gambar 2.1 dapat dijelaskan bahwa manusia memiliki hak untuk menjaga keamanan fisik, berpartisipasi politik, lingkungan berkelanjutan, saling menghormati, memperoleh akses teknologi, memiliki keluarga dan lingkungan, kebebasan berencana, memiliki persamaan hukum, kebebasan beragama, dan kebebasan berekspresi. Manusia dalam melakukan banyak hal tersebut tercakup dalam tiga dimensi atau ranah yang dipenuhi. Ketiga dimensi tersebut yaitu: umur panjang dan hidup sehat, pendidikan, dan standar hidup layak. Indikator umur panjang dan hidup sehat dapat dilihat dari angka harapan hidup saat lahir manusia. Indikator pendidikan dapat dilihat dari harapan lama sekolah dan rata-rata sekolah. Sedangkan indikator standar hidup layak dilihat dari pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

2.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita

PDRB per kapita dapat dijadikan sebagai salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah. PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode (Hadi Sasana, 2006). PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah. Sedangkan PDRB per kapita dapat dihitung dari PDRB harga konstan dibagi dengan jumlah penduduk pada suatu wilayah.

Produk Domestik Bruto sebagai salah satu indikator ekonomi memuat berbagai instrument ekonomi yang di dalamnya terlihat jelas keadaan makro ekonomi suatu daerah dengan pertumbuhan ekonominya, income perkapita dan berbagai instrument ekonomi lainnya. Dimana dengan adanya data-data tersebut akan sangat membantu pengambil kebijaksanaan dalam perencanaan dan evaluasi

sehingga pembangunan tidak salah arah. Angka PDRB sangat diperlukan dan perlu disajikan, karena selain dapat dipakai sebagai bahan analisa perencanaan pembangunan juga merupakan barometer untuk mengukur hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Di dalam perekonomian suatu negara, masing-masing sektor tergantung pada sektor yang lain, satu dengan yang lain saling memerlukan baik dalam tenaga, bahan mentah maupun hasil akhirnya. Sektor industri memerlukan bahan mentah dari sektor pertanian dan pertambangan, hasil sektor industri dibutuhkan oleh sektor pertanian dan jasa-jasa.

Menurut Badan Pusat Statistik (2008) angka PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran yang selanjutnya dijelaskan sebagai berikut :

1. Menurut Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi yang berada di suatu wilayah/provinsi dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 9 sektor atau lapangan usaha yaitu; Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih, Bangunan, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Jasa Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, Jasa-jasa.

2. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini PDRB mencakup juga penyusutan neto. Jumlah semua komponen pendapatan per sektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Oleh karena itu PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor.

3. Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir yaitu:

- a) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung.
- b) Konsumsi pemerintah.
- c) Pembentukan modal tetap domestik bruto.
- d) Perubahan stok.
- e) Ekspor netto.

2.4 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian tentang kemiskinan diberbagai negara telah dilakukan oleh sejumlah peneliti, antara lain :

- a) Penelitian yang dilakukan oleh Apriliyah S. Napitupulu (2007) dengan judul "Pengaruh Indikator Komposit Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Utara". Tulisannya meneliti tentang pengaruh indikator komposit Indeks Pembangunan Manusia terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara. Analisis yang dilakukan menggunakan Regresi linier berganda dengan *ordinary least square/OLS*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari ketiga variabel yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, konsumsi perkapita mempunyaipengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara.

- b) Penelitian yang dilakukan oleh Merna Kumalasari (2011) dengan judul Analisis pertumbuhan ekonomi, angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita, dan jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Model analisis yang digunakan adalah panel data dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM) atau Least Square Dummy Variable (LSDV) model, dengan menggunakan data time series selama lima tahun (2005-2009) dan data cross section sebanyak 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Dengan LSDV model diharapkan dapat memperoleh hasil estimasi yang lebih efisien. Hal ini dikarenakan tingginya jumlah observasi yang memiliki implikasi pada data yang lebih informatif, lebih variatif, dan peningkatan derajat bebas (df). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Angka Harapan Hidup (AHH), Pengeluaran Perkapita Disesuaikan, dan Jumlah Penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
- c) Penelitian yang dilakukan oleh Fathkul Mufid Cholili (2014) dengan judul Analisis Pengaruh Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap jumlah penduduk miskin (studi kasus pada 33 provinsi di Indonesia). Penelitian ini menganalisis faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana tiga variabel independen berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia, dengan variabel independen adalah indeks pembangunan manusia, produk domestik regional bruto, dan pengangguran baik secara simultan maupun secara parsial. Teori kemiskinan, pertumbuhan PDRB dan IPM dengan model Ordinary Least Square (OLS) digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian memperlihatkan adanya pengaruh secara simultan dari ketiga variabel independen dengan koefisien determinan 0.743 (R-Square). Namun ketika diuji secara parsial PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan IPM dan pengangguran secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Tabel 2.4 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Penulis	Variabel	Alat Analisis	Hasil
1.	Deny Tisna Amijaya (2008) dengan judul “Pengaruh ketidakmerataan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2003-2004”	<p>MS = f (GR, PDRB, PG)</p> $Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + \beta_3 X3_{it} + U_{it}$ <p>Dimana:</p> <p>MS = jumlah kemiskinan.</p> <p>GR = variabel ketidakmerataan distribusi pendapatan.</p> <p>PDRB = variabel tingkat pertumbuhan ekonomi.</p> <p>PG = variabel tingkat pengangguran.</p> <p><i>i</i> = cross section.</p> <p>t = time series.</p> <p><i>B0</i> = konstanta.</p>	Analisis Deskriptif dan ekonometrika dengan menggunakan metode Panel Data.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ketidakmerataan distribusi pendapatan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan variabel pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.

		<p>$B1, B2, B3 = \text{koefisien.}$</p> <p>$U = \text{error.}$</p>		
2	<p>Hermanto Siregar dan Dwi Wahyu Winarti (2006) yang berjudul “Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin”.</p>	<p>Poverty = $\beta_0 + \beta_1 \text{ PDRB} + \beta_2 \text{ Populasi} + \beta_3 \text{ Agrishare} + \beta_4 \text{ Industrieshare} + \beta_5 \text{ Inflasi} + \beta_6 \text{ SMP} + \beta_7 \text{ SMA} + \beta_8 \text{ DIPLOMA} + \beta_9 \text{ Dummy Krisis} + \varepsilon$</p> <p>Dimana:</p> <p>Poverty = tingkat kemiskinan</p> <p>PDRB = Produk Domestik Regional Bruto</p> <p>Agrishare = pangsa sektor pertanian dalam PDRB</p> <p>Industrieshare = pangsa sektor industri dalam PDRB</p> <p>Inflasi = tingkat inflasi</p> <p>SMP = jumlah lulusan setingkat SMP</p>	<p>Analisis Deskriptif dan ekonometrika dengan menggunakan metode Panel Data.</p>	<p>Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kenaikan PDRB mengakibatkan penurunan atas angka kemiskinan, kenaikan Jumlah Penduduk mengakibatkan peningkatan atas angka kemiskinan, kenaikan Inflasi mengakibatkan peningkatan atas angka kemiskinan, kenaikan Share pertanian dan industri mengakibatkan penurunan atas angka</p>

		<p>SMA = jumlah lulusan setingkat SMA</p> <p>DIPLOMA = jumlah lulusan setingkat Diploma</p> <p>Dummy Krisis = dummy krisis ekonomi</p>		<p>kemiskinan, kenaikan tingkat pendidikan mengakibatkan penurunan atas angka kemiskinan. Dimana pengaruh tingkat pendidik SMP lebih besar dari pada pengaruh share pertanian. Sedangkan kenaikan Dummy krisis mengakibatkan peningkatan atas angka kemiskinan.</p>
3.	<p>Apriliyah S. Napitupulu (2007) dengan judul "Pengaruh Indikator</p>	<p>$Y = \alpha_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + u$</p> <p>Y : jumlah penduduk miskin Sumatera Utara</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode Ordinary Least Square</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah variabel angka harapan hidup, angka</p>

	Komposit Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin di Sumatra Utara”.	(jiwa) X1 : angka harapan hidup (tahun) X2 : angka melek huruf (persen) X3 : konsumsi perkapita	(OLS), data yang digunakan berupa data time series dari tahun 1990 sampai 2004	melek huruf dan konsumsi perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.
4.	Merna Kumalasari (2011) dengan judul Analisis pertumbuhan ekonomi, angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita, dan jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.	Penelitian ini menggunakan tingkat kemiskinan Jateng sebagai variabel dependen, sedangkan sebagai variabel independen dalam penelitian ini yaitu laju pertumbuhan ekonomi, angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, pengeluaran perkapita disesuaikan, dan jumlah penduduk.	Model penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini adalah dengan model panel data.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Angka Harapan Hidup (AHH), Pengeluaran Perkapita Disesuaikan, dan Jumlah Penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

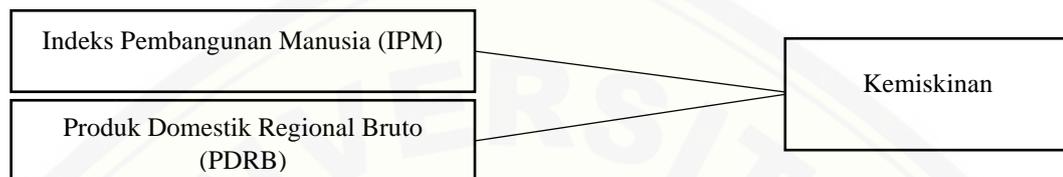
5.	<p>Lucky Selvandra Ariyus (2015) dengan judul Analisis pengaruh angka harapan hidup PDRB per Kapita, dan Pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten.</p>	<p>Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen yaitu penduduk miskin, dan variabel independen yaitu angka harapan hidup, PDRB per Kapita, dan pengangguran per kapita.</p>	<p>Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan metode <i>Ordinary Least Square</i> (OLS) yang menggunakan data antar ruang (<i>cross section</i>) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2012 dengan bantuan <i>software Eviews 4.1</i>.</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Angka Harapan Hidup berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten, PDRB per kapita tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten, dan jumlah pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap</p>

				jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten.
6.	Fathkul Mufid Cholili (2014) dengan judul Analisis Pengaruh Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap jumlah penduduk miskin (studi kasus pada 33 provinsi di Indonesia).	variabel independen dalam penelitian ini adalah indeks pembangunan manusia, produk domestik regional bruto, dan pengangguran dan variabel dependennya adalah penduduk miskin.	Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan metode <i>Ordinary Least Square</i> (OLS).	Hasil penelitian memperlihatkan adanya pengaruh secara simultan dari ketiga variabel independen dengan koefisien determinan 0.743 (R-Square). Namun ketika diuji secara parsial PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan IPM dan pengangguran secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan

				terhadap tingkat kemiskinan.
7	Pengaruh Inflasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 1998-2014	$PRV = a + bIN$ PRV : nilai kemiskinan di Indonesia dalam satuan persen IN : inflasi Indonesia dari data Consumption Price Index dalam satuan persen	Regresi linier sederhana	Hasil perhitungan diperoleh hasil adanya hubungan searah dan signifikan antara inflasi dengan kemiskinan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan teori makroekonomi bahwa naiknya inflasi akan menurunkan pendapatan riil sehingga menurunkan daya beli masyarakat yang berpenghasilan tetap dan rendah.

2.5 Kerangka Konseptual

Dari penjelasan di atas dapat digambarkan pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap jumlah angka kemiskinan dalam suatu kerangka pemikiran seperti berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

Sumber : Berbagai sumber, diolah 2020

2.6 Hipotesis

Hipotesis adalah pendapat sementara dan pedoman serta arah dalam penelitian yang disusun berdasarkan pada teori yang terkait, dimana suatu hipotesis selalu dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan dua variabel atau lebih (J. Supranto, 1997). Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah :

- 1) Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif terhadap jumlah kemiskinan yang ada di 34 provinsi di Indonesia. Periode tahun 2010 - 2018
- 2) Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif terhadap jumlah kemiskinan yang ada di 34 provinsi di Indonesia. Periode tahun 2010 - 2018

BAB 3

METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metode yang akan digunakan dalam mengestimasi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Pembahasan dalam bab 3 ini mencakup metode penelitian yang digunakan dan dirangkum dalam subbab sebagai berikut, yaitu 3.1 menjelaskan jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian.

3.1. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder berupa data *time series*. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dengan tujuan dapat digunakan oleh masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu (Kuncoro,2009). Data yang dikumpulkan berbentuk kuartalan dari tahun 2010 sampai dengan 2018. Fokus penelitian ini adalah negara indonesia. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Selain itu peneliti juga memperoleh daftar pustaka dari jurnal, artikel dan berbagai referensi lainnya yang berhubungan dengan tema yang akan di teliti.

3.2. Spesifikasi Model Penelitian

Sehingga didapat model penelitiannya sebagai berikut:

$$P = \beta_0 + \beta_1 IPM + \beta_2 PDRB + E \dots\dots\dots 3.2$$

Keterangan :

- P = Tingkat Kemiskinan
- IPM = Indeks Pembangunan Manusia
- PDRB = Produk Domestik Regional Bruto
- E = error

3.3. Analisis Data

3.3.1. Analisis Statistik Deskriptif

Pada tahap analisis statistik deskriptif ini digunakan untuk menganalisa data dengan memberi gambaran data yang telah dikumpulkan dari segi jumlah sampel, nilai maksimum dan minimum, nilai mean serta korelasi antara variabel yang digunakan dalam penelitian

3.3.2. Ordinary Least Square

Ordinary Least Square (metode kuadrat terkecil) merupakan metode yang digunakan untuk estimasi dengan menggunakan penyimpangan atau error yang minimum. Metode ini memiliki pengaruh dalam menganalisis suatu garis regresi, sehingga menciptakan suatu garis regresi sampel yang baik. Maka nilai hasil prediksi harus sedekat mungkin dengan data aktualnya (Widarjono,2013)

Metode untuk meminimalkan resiko dapat dilakukan dengan langkah berikut:

$$u_i = Y_i - \beta_0 - \beta_1 X \dots\dots\dots (3.3)$$

u_i dapat memiliki nilai positif, negatif ataupun nol, oleh karena metode OLS disebut sebagai metode untuk mencari jumlah penyimpangan kuadrat ($\sum u_i^2$)

sehingga:

$$u_i^2 = (Y_i - \beta_0 - \beta_1 X_i)^2 \dots\dots\dots (3.5)$$

$$\sum u_i = \sum (Y_i - \beta_0 - \beta_1 X)^2 \dots\dots\dots(3.6)$$

Prinsip OLS mengatakan bahwa untuk mendapatkan persamaan regresi perlu menduga nilai dari β_0 dan β_1 sehingga $\sum u_i^2$ dapat minimum. Dalam artian metode OLS diperlukan dalam mencari nilai penduga β_0 dan β_1 , sehingga fungsi regresi terestimasi dekat sekali dengan model regresi yang sebenarnya, metode OLS dapat menjamin jumlah residual kuadrat terkecil dapat diperjelas sebagai berikut:

$$\text{Minimize } \sum u_i = \sum (Y_i - \beta_0 - \beta_1 X)^2 \dots\dots\dots(3.7)$$

$\sum u_i^2$ akan minimum apabila :

$$\frac{dy}{dx}\beta_0 \sum u_i^2 = 0 \rightarrow 2 \sum (Y_i - \beta_0 - \beta_1 X) = 0 \dots\dots\dots(3.8)$$

$$\frac{dy}{dx}\beta_1 \sum u_i^2 = 0 \rightarrow 2 \sum (Y_i - \beta_0 - \beta_1 X) X = 0 \dots\dots\dots(3.9)$$

Apabila kedua persamaa diatas sama dengan nol, maka β_0 dan β_1 menjadi simbol b_0 dan b_1 yang tidak menjadi simbol yang tidak menunjukkan β_0 dan β_1 , namun merupakan nilai tertentu yang berhubungan dengan $\sum u_i^2$ minimum.

1. Prosedur pengujian *Ordinary Least Square*

Persamaan regresi b_0 dan b_1 merupakan penduga untuk β_0 dan β_1 , oleh sebab itu harus mempunyai sifat

- a. Estimator-estimator Ordinary Least Square hanya dapat mengekspresi pada nilai yang dapat diamaati (Y dan X). sehingga mudah perhitungannya.
- b. Setiap estimator hanya dapat memberikan nilai tunggal pada parameter populasi yang relevan.
- c. Estimator dapat diperoleh dari data sampel, garis regresi sampel dapat ditentukan dengan mudah.
- d. Estimator b_0 memiliki varian yang minimum (*best*), estimator tidak bias dengan varian minimum yang disebut dengan estimator efisien (*efficient estimator*)

Salah satu analisis regresi yang umum digunakan adalah analisis *Ordinary Least Square* (OLS) yang terbentuk berdasarkan tingkat kesalahan kuadrat terkecil. Meskipun metode OLS dapat memberikan hasil perhitungan yang mencapai tingkat kesalahan kuadrat minimum, namun pertanyaan adalah seberapa baik metode OLS ini dapat memberikan hasil estimasi yang dapat menggambarkan keseluruhan populasi. Apabila bentuk regresi yang umum digunakan adalah $Y = \alpha - \beta X - \mu$, dengan berbagai asumsi-asumsi yang terkait.

Ada beberapa asumsi yang umum digunakan yang dikenal dengan The Classical Linier Regression Model (CLRM), adalah sebagai berikut (Gujarati, 1995 dalam Wardhono):

- a. Variabel independen (X) harus tidak berkorelasi atau memiliki hubungan dengan variabel pengganggu (μ). Tetapi jika sifat dari variabel tersebut *nonstochastic*, maka otomatis asumsi tersebut dapat terpenuhi.
- b. Nilai *mean* dari kesalahan pengganggu (μ) atau ekspektasinya dianggap nol. $E(\mu) = 0$
- c. Variance untuk setiap nilai kesalahan pengganggu bersifat konstan atau *homoschedastic*.
- d. Variabel tersebut harus bebas dari autokorelasi antara dua kesalahan pengganggu yang diformulasikan dengan $cov(\mu_i, \mu_j) = 0: i \neq j$
- e. Kesalahan pengganggu μ memiliki distribusi normal dengan rata-rata nol dan variance σ^2 .

Perlu diketahui bahwa asumsi tersebut berlaku juga untuk regresi berganda yang proses perhitungannya menggunakan metode OLS.

3.3.3. Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis bermanfaat dalam memeriksa atau menguji apakah koefisien regresi tersebut signifikan, yang dimaksud signifikan adalah suatu nilai koefisien regresi yang secara statistik tidak sama dengan nol, jika koefisien tersebut slope sama dengan nol maka dapat dikarakan bahwa tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Terdapat 3 topik yang sangat penting untuk dibahas dalam pengamplikan pengujian suatu hipotesis pada analisis regresi pada variabel terikat.

Terdapat dua jenis pengujian hipotesis terhadap koefisien regresi yang dapat dilakukan yang disebut dengan uji t dan uji f. uji t merupakan uji yang biasanya digunakan untuk menguji hipotesis koefisien slope regresi secara individual. Sedangkan untuk menguji secara bersama-sama menggunakan uji F.

a. Uji F

Uji F di pergunakan untuk melakukan uji hipotesis koefesien (slope) regresi secara bersamaan, uji ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara keseluruhan . uji F menggunakan menggunakan hipotesis sebagai berikut (Nairobi,1995):

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ (tidak ada pengaruh)

$H_1 : \beta_i \neq 0$ (ada pengaruh) untuk $i = 1, \dots, k$

Metode perhitungannya dilakukan dengan membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel, apabila F-hitung dinyatakan $>$ F-tabel, maka H_0 ditola dan dapat diartikan bahwa variabel independen secara bersama mempengaruhi variabel dependen. Nilai dari fungsi F-hitung dapat diperoleh dengan rumus:

$$F_{hit} = \frac{R^2 / (K-1)}{(1-R^2)/(n-k)} \dots\dots\dots(3.10)$$

Keterangan:

R^2 = koefesien determinasi

k = jumlah variabel independen

n = jumlah observasi

b. Uji t

Uji t merupakan uji yang digunakan untuk menguji hipotesis tentang koefesien slope secara individual, uji ini mudah untuk digunakan karena uji ini dapat menjelaskan perbedaan setiap unit pengukuran variabel dan deviasi standar koefesien yang diestimasi, uji t adalah uji yang tepat yang digunakan apabila nilai-nilai residualnya terdistribusi normal dan apabila varian dari distribusi tersebut harus diestimasi. Sehingga pengujian hipotesis uji t ini menjadi standar praktis dalam ekonometrika.

$H_0 : \beta_i = 0$ dan $H_1 : \beta_i \neq 0$

$i = 0, 1, 2, 3, \dots, k$; k merupakan koefesien slope

Hipotesis diatas dapat dilihat dari pengujian yang dilakukan, yaitu berdasarkan data yang tersedia, sehingga akan dilakukan pengujian β_i (koefesien regresi populasi), jika hasil tersebut sama dengan nol maka variabel bebas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat, jika data tersebut tidak sama dengan nol maka artinya variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Nacrowi dan Usman, 2006). Uji t didefinisikan sebagai berikut:

$$t.k = \frac{(b_k - \beta_k)}{SE(b_k)}$$

keterangan:

b_k = koefesien regresi hasil estimasi untuk variabel ke k

β_k = parameter koefesien regresi populasi untuk variabel ke k, biasanya dianggap nol. nilai ini menunjukkan nilai nol bagi β_k

$SE(b_k)$ = standar error koefesien b_k

c. Koefesien Determinasi

Koefesien determinasi yang dinotasikan R^2 , merupakan suatu ukuran yang penting dalam pengukuran regresi, hal ini dikarenakan R^2 dapat memberikan informasi baik atau tidak baiknya model yang akan diestimasi. Nilai yang didapat dari pengukuran R^2 dapat mengukur seberapa keterpengaruhan variabel independen yang digunakan terhadap variabel dependen. Dalam artian semakin tinggi nilai koefesien determinasinya maka semakin bagus modelnya. Nilai koefesien determinasi dapat di rumuskan sebagai berikut:

$$R^2 = \frac{SSR}{SST} \dots\dots\dots(3.11)$$

SST = variasi dari data

SSR = variasi dari garis regresi yang dibuat

3.3.4. Pengujian Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah hasil estimasi memenuhi asumsi dasar linier klasik atau tidak. Pengujian ini penting dilakukan dikarenakan memiliki hubungan erat dengan estimator OLS dari regresi yang memenuhi kriteria BLUE (*best linier unbiased estimator*). Uji asumsi klasik ini meliputi uji homokedastisitas, uji multikolinieritas, uji normalitas, dan uji autokorelasi.

a. Multikolinieritas

Multikolinieritas merupakan suatu gejala yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan sempurna antara semua atau beberapa variabel penjelas (variabel bebas). Terjadinya multikolinieritas diakibatkan nilai R^2 tinggi dan nilai t semua variabel penjelas tidak signifikan, serta nilai F tinggi. Dampak dari terjadinya multikolinieritas sempurna adalah koefisien regresi yang diestimasi tidak dapat diestimasi dan nilai simpangan baku setiap koefisien menjadi tak terhingga. Salah satu cara untuk mengetahui apakah terdapat multikolinieritas adalah dengan menggunakan uji Klein. Caranya dengan melihat derajat melihat derajat dari koefisien partial (r^2) dari regresi antar variabel bebas dalam penelitian. Jika nilai r^2 lebih besar atau sama dengan nilai R^2 maka dapat disimpulkan tingkat multikolinieritas cukup tinggi dan membahayakan bagi hasil estimasi.

b. Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas ini dimaksudkan untuk melihat apakah varian setiap disturbance term yang telah dibatasi oleh nilai dari variabel bebas adalah konstan = s^2 . Untuk mengetahui apakah model memiliki penyakit heterokedastisitas maka digunakan uji Autoregressive Conditional Heterokedasticity (ARCH), atau disebut dengan Arch Test.

Kita dapat melihat heterokedastisitas suatu model dengan menggunakan uji LM dengan melihat setengah jumlah kuadrat yang diterangkan, yang secara asimtotik memiliki distribusi CS (*Chi-Square*).

Metode pengujiannya adalah jika F dan CS hitung lebih besar dari F dan X^2 tabel menunjukkan terjadi heterokedastisitas atau tidak.

c. Autokorelasi

Autokorelasi merupakan suatu kondisi dimana variabel pengganggu observasi terjadi hubungan serial dikarenakan berbagai faktor, konsekuensi dari adanya autokorelasi:

1. Uji t maupun uji F menjadi tidak valid, sehingga kesimpulannya yang dibuat akan bias.
2. Estimator maupun uji f menjadi tidak valid, dan test signifikansi menjadi tidak valid lagi
3. Estimator OLS sangat sensitif terhadap fluktuasi sampling

Dalam pengujian ada tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan Durbin Watson (DW).

d. Normalitas

Uji normalitas dari variabel pengganggu dapat diamati dengan melakukan uji Jarque-Berra LM (Gujarati,1995). Seperti yang telah diketahui selama ini diasumsikan bahwa variabel pengganggu mempunyai distribusi normal, sehingga untuk mengetahui maka kita dapat menggunakan uji normalitas (Supranto, 1995)

1. Linieritas

Uji linieritas memiliki tujuan untuk mengetahui apakah dua variabel memiliki hubungan yang linier atau tidak secara signifikan. Uji linieritas digunakan sebagai syarat statistik parametrik khususnya dalam analisis korelasi atau regresi linier yang termasuk dalam hipotesis atau asosiatif (Supranto, 2005)

3.5. Definisi Variabel Operasional

Definisi operasional dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan tujuan dan arah penulisan yang di kaitkan dengan pengaruh terhadap masing-masing variabel di negara Indonesia :

1. Tingkat Kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil persentase jumlah penduduk miskin yaitu penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik dibagi jumlah penduduk dikalikan seratus persen di 34 provinsi di Indonesia tahun 2010 – 2018 dengan jenis data kuartalan yang dinyatakan dalam satuan persen.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang digunakan dalam penelitian ini adalah indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks standar hidup layak di Indonesia tahun 2010 – 2018 dengan jenis data kuartalan yang dinyatakan dalam bentuk ratusan.
3. Produk Domestik Regional Bruto adalah Produk Domestik Regional Bruto setelah disesuaikan dengan indeks harga konsumen dan penurunan utilitas marginal (per tahun) (dalam satuan ribu rupiah) di Indonesia periode tahun 2010 – 2018 dengan jenis data kuartalan. Data diambil dari BPS.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode *ordinary least square* dan pembahasan pada bab sebelumnya, hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Artinya jika IPM naik maka akan menurunkan jumlah kemiskinan di Indonesia.
2. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Artinya jika pertumbuhan ekonomi naik maka akan menurunkan jumlah kemiskinan di Indonesia.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa saran untuk mengatasi kemiskinan dari penelitian ini yang meliputi:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia agar lebih baik lagi sehingga jumlah kemiskinan di Indonesia dapat dikendalikan dengan baik.
2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi agar jumlah kemiskinan di Indonesia dapat dikendalikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Stastika Jakarta Pusat. 2016. *Desember 2016 Inflasi 0,42 Persen*. Jakarta Pusat: Badan Pusat Statistika.
- Boediono. 2009. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Joesran, Tati Suhartati. 2009. Efektifkah Penerapan Inflation targeting di Indonesia? *Kapita Selektu Ekonomi Indonesia Vol.01*.
- Keynes, John M. 1936. *The General Theory of Employment, Interest and Money*. London: Macmillan.
- Kurniawan, Dhani. 2006. Kemiskinan di Indonesia dan Solusinya. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Lipsey, Richard G. 1995. *Pengantar Mikroekonomi Edisi Kesepuluh Jilid Satu*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Mankiw, N. Gregory. 2000. *Teori Makroekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mankiw, N. Gregory. 2007. *Makroekonomi*. Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga.
- Muana, Nanga. 2001. *Makro Ekonomi, Teori, Masalah dan Kebijakan*. Edisi Perdana. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nurwati, Nunung. 2008. Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan. *Jurnal Kependudukan Padjajaran*.
- Purwanto, Erwan Agus. 2007. Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk Pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.
- Remi, Sutyastie Soemitro. 2009. Implikasi Proyeksi Penduduk Indonesia terhadap Pembangunan, Kemiskinan dan Pengangguran. *Kapita Selektu Ekonomi Indonesia Vol.01*.
- Rini, Ayu Setyo. Sugiharti, Lilik. 2016. Faktor-faktor Penentu Kemiskinan di Indonesia: Analisis Rumah Tangga. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*.
- Samuelson, P. A. 1985. *Economics: Elevent Edition*. McGraw: Boston.
- Sukirno, Sadono. 2002. *Pengantar Teori Makroekonomi*. Edisi Kedua. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiartiningsih. 2013. The Effect Of Economic Growth On The Number Of Poor

People in Indonesia Period 1994-2010. *International Annual Symposium on Management (INSYMA)*.

Sugiartiningsih, Shaleh, Khaerul. 2017. Pengaruh Inflasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 1998-2014. *Profesionalisme Akuntan Menuju Sustainable Business Practice* ISSN- 2252-3936.



Lampiran A. Data Penelitian

Periode	P	IPM	PDRB
2010Q1	14.15	57.25	18652.97
2010Q2	13.86	58.05	19209.31
2010Q3	13.66	59.09	20333.34
2010Q4	13.33	59.21	20974.94
2011Q1	12.98	60.24	21744.88
2011Q2	12.64	60.81	22865.43
2011Q3	12.49	61.68	23623.92
2011Q4	12.15	61.97	25526.4
2012Q1	11.96	62.26	27571.53
2012Q2	11.83	62.35	27977.01
2012Q3	11.74	62.67	28096.71
2012Q4	11.66	63.13	29521.27
2013Q1	11.53	63.41	30202.44
2013Q2	11.42	64.3	31961.95
2013Q3	11.37	64.89	32648.02
2013Q4	11.47	65.2	32991.61
2014Q1	11.25	65.89	34893.62
2014Q2	11.08	66.68	35288.32
2014Q3	10.96	67.17	36629.18
2014Q4	10.87	67.63	37223.11
2015Q1	11.33	68.38	38099.86
2015Q2	11.22	69.05	38314.56
2015Q3	11.17	69.65	40091.23
2015Q4	11.13	70.17	41948.37
2016Q1	11.01	70.72	42480.08
2016Q2	10.97	70.91	42439.73
2016Q3	10.86	71.31	44425.08
2016Q4	10.7	72.02	45275.58
2017Q1	10.64	72.62	46211.04
2017Q2	10.59	73.21	46402.47
2017Q3	10.31	73.82	48472.86
2017Q4	10.12	74.17	48827.25
2018Q1	9.82	74.59	50087.24
2018Q2	9.78	75.12	54049.32
2018Q3	9.66	75.83	56305.11
2018Q4	9.43	76.61	58762.56

Lampiran B. Hasil Uji Statistik

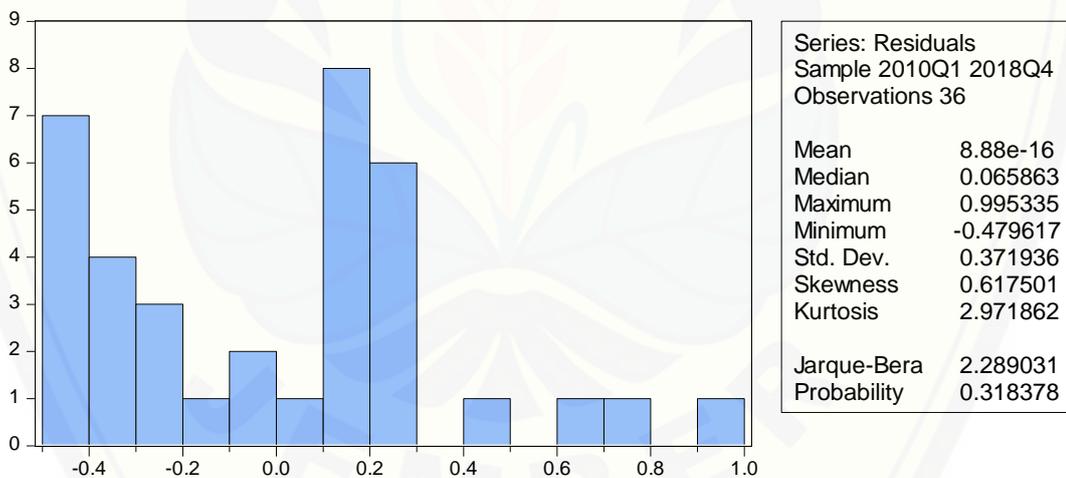
Dependent Variable: P
 Method: Least Squares
 Date: 11/16/20 Time: 10:58
 Sample: 2010Q1 2018Q4
 Included observations: 36

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-64.96141	5.548065	-11.70884	0.0000
IPM	-0.152609	0.047847	-3.189529	0.0031
LOG_PDRB	6.104447	0.832016	7.336936	0.0000

R-squared	0.956244	Mean dependent var	11.42056
Adjusted R-squared	0.953592	S.D. dependent var	1.157477
S.E. of regression	0.249349	Akaike info criterion	0.139730
Sum squared resid	2.051776	Schwarz criterion	0.271690
Log likelihood	0.484854	Hannan-Quinn criter.	0.185788
F-statistic	360.5919	Durbin-Watson stat	0.472200
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran C. Hasil Uji Asumsi Klasik

Lampiran C1. Hasil Uji Normalitas



Lampiran C2. Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	32.14582	Prob. F(2,31)	0.0000
Obs*R-squared	24.28858	Prob. Chi-Square(2)	0.0000

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 11/16/20 Time: 11:22

Sample: 2010Q1 2018Q4

Included observations: 36

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
IPM	-0.096522	0.060441	-1.596966	0.1204
PDRB	4.99E-05	3.07E-05	1.624837	0.1143
C	4.671643	2.951472	1.582818	0.1236
RESID(-1)	0.824257	0.173115	4.761320	0.0000
RESID(-2)	0.026574	0.180444	0.147272	0.8839

R-squared	0.674683	Mean dependent var	8.88E-16
Adjusted R-squared	0.632706	S.D. dependent var	0.371936
S.E. of regression	0.225411	Akaike info criterion	-0.013535
Sum squared resid	1.575116	Schwarz criterion	0.206398
Log likelihood	5.243639	Hannan-Quinn criter.	0.063227
F-statistic	16.07291	Durbin-Watson stat	1.634753
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran C3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors

Date: 11/16/20 Time: 11:19

Sample: 2010Q1 2018Q4

Included observations: 36

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
IPM	1.009391	10414.86	70.50377
PDRB	2.415209	841.1841	70.50377
C	22.45322	5509.214	NA

Lampiran C4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	1.119396	Prob. F(2,33)	0.3940
Obs*R-squared	10.04959	Prob. Chi-Square(2)	0.3465
Scaled explained SS	3.362174	Prob. Chi-Square(2)	0.9482

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 11/16/20 Time: 11:20

Sample: 2010Q1 2018Q4

Included observations: 36

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.095854	1.801906	3.383004	0.0019
IPM	-0.115124	0.036851	-3.124021	0.0037
PDRB	4.85E-05	1.87E-05	2.599864	0.0138

R-squared	0.454737	Mean dependent var	0.134494
Adjusted R-squared	0.421691	S.D. dependent var	0.191540
S.E. of regression	0.145659	Akaike info criterion	-0.935436
Sum squared resid	0.700150	Schwarz criterion	-0.803477
Log likelihood	19.83786	Hannan-Quinn criter.	-0.889379
F-statistic	13.76064	Durbin-Watson stat	0.495056
Prob(F-statistic)	0.000045		